BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Kantor Pengolahan Data Elektronik *(KPDE)* Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat adalah kelanjutan dari organisasi sejenis yang semula sudah ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan nama Pusat Pengolahan Data *(PUSLAHTA)* Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Keberadaan PUSLAHTA di Jawa Barat dimulai pada tahun 1977, yaitu dengan adanya Proyek Pembangunan Komputer Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Proyek tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan sarana prasarana dalam rangka memasuki era komputer. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 8 April 1978 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78 diresmikan pembentukan/pendirian *Kantor Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA)* Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di jalan Tamansari No. 57 Bandung.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78, maka pada tanggal 29 Juni 1981 pendirian Kantor PUSLAHTA dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Pusat Pengolahan Data *(PUSLAHTA)* Provinsi

Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Dengan kedua Peraturan Daerah tersebut keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat semakin berperan, khususnya dalam melaksanakan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah di bidang komputerisasi. Akan tetapi keberadaan kedua Peraturan Daerah tersebut tidak mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, sehingga keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat kedudukan organisasi menjadi non structural. Akan tetapi dengan keberadaan Puslahta Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada masa itu telah banyak dirasakan manfaatnya selain oleh lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga oleh instansi lain dalam bentuk kerja sama penggunaan mesin komputer IBM S-370/125 seperti :

- IPTN
- PJKA
- ITB
- Dan pihak Swasta lainnya.

Dalam perjalanan waktu yang cukup panjang, yaitu lebih kurang 14 tahun sejak PUSLAHTA didirikan, pada tanggal 27 Juni 1992 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 21 Tahun 1992 Organisasi PUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa

Barat dibubarkan. Di dalam salah satu pasal Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 dinyatakan bahwa tugas dan wewenang PUSLAHTA dialihkan ke Kantor Bappeda Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pada tanggal yang sama dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 tentang Pembubaran PUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, keluar Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 22 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik *(KPDE)* Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai pelaksana dari Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor : 5 tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik, pada tanggal 30 Juni 1993 keluar persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara *(Menpan)* dengan Nomor : B-606/I/93 perihal Persetujuan Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik untuk Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan keluarnya Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara *(Menpan)* tersebut, maka untuk mengukuhkan Keputusan Gubernur Nomor 22 Tahun 1992 diajukan Rancangan Peraturan Daerahnya, dan akhirnya pada tanggal 21 Juni 1994 berhasil ditetapkan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 4 tahun 1994 tentang Pengukuhan Dasar Hukum Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Nomor 5 tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Selanjutnya kedua Peraturan Daerah tersebut diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan, dan pada tanggal 10 Juli 1995 keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Nomor : 4 dan Nomor : 5 Tahun 1994, dengan demikian KPDE Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat secara resmi menjadi salah satu *Unit Pelaksana Daerah yang struktural.*

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 16 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan *Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah* disingkat *BAPESITELDA* sebagai pengembangan dari Kantor Pengolahan Data Elektronik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 22 Tahun 1992 dan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1994. Sedangkan Kantor Pengolahan Data Elektronik itu sendiri merupakan pengembangan dari Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Jawa Barat yang berdiri pada tanggal 8 April 1978 melalui Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa

Barat No. 294/OK.200-Oka/SK/78, dan keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1981 tanggal 29 Juni 1981.

2.1.1 Visi dan Misi

VISI :

Terwujudnya Efekiifitas dan Efisien Komunikasi dan Informatika penyelenggara pemerintahan dalam rangka mewujudkan Kota Bandung sebagai kota jasa bermartabat.

MISI :

1. Meningkatkan dan Mengembangkan kemitraan, pemberdayaan dan pemdayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika.Meningkatkan layanan publik pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan komunikasi dialogis .
2. Menigkatkan pelayanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan budaya masyarakat berbasis teknologi dan informasi.
3. Menigkatkan kerjasama,kemitraan dan pemberdayan lembagakomunikasi dan informatika.
4. Pemerintahan dan masyarakat mendorong peran media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab.

5. Meningkatkan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang handal.
6. Mendorong peranan media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab serta memberikan nilai tambah pembangunan bangsa.
7. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan dalam rangka menciptakan kemandirian dan daya saing bidang komunikasi dan informatika.
8. Meningkatkan kualitas pengawasan menuju terselanggaranya kepemerintahan yang baik (good govermance).

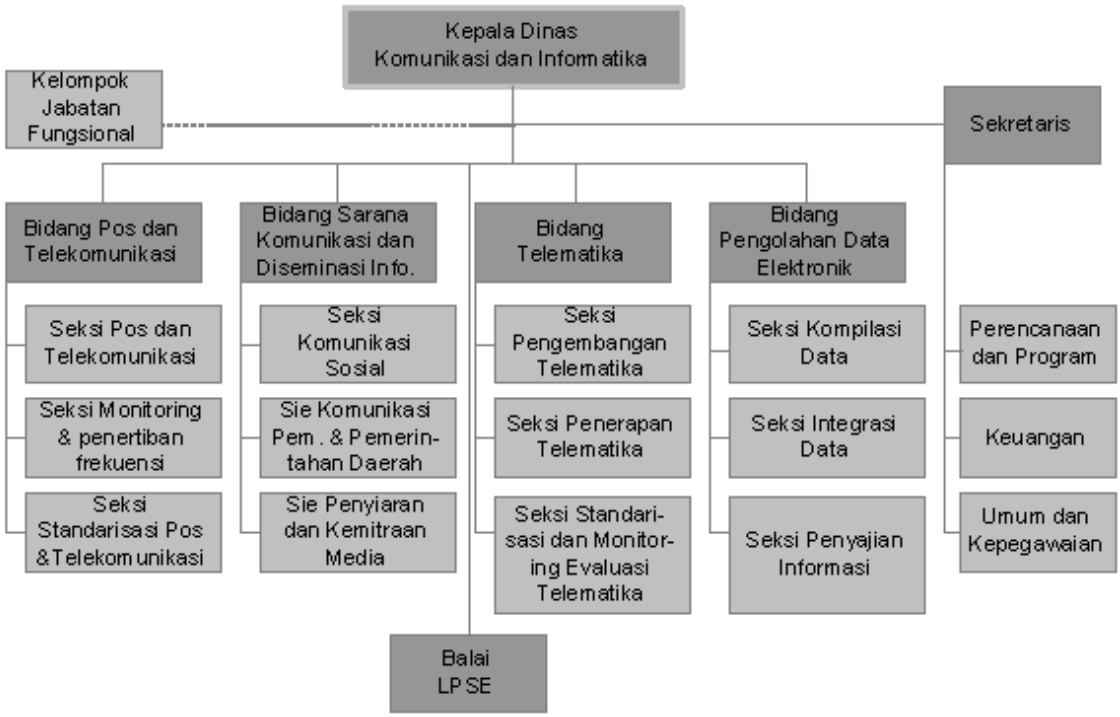
2.2 Struktur Organisasi

Menurut Andri Kristanto (2003) Dalam organisasi, pengelompokan orang-orang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan dengan tujuan yang sama dinamakan departemen atau divisi. Bagan organisasi menunjukan bagaimana departemen-departemen yang ada akan dikoordinasi sesuai jalur wewenang yang dimiliki. Bagan organisasi adalah penggambaran struktur kerja dari sebuah organisasi, dimana didalamnya menunjukan hubungan wewenang dan tanggung jawab serta deskripsi pekerjaan yang harus dilakukan.

Struktur organisasi merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan begitu saja oleh suatu organisasi, terutama organisasi formal. Persoalan yang langsung mempengaruhi masalah struktur organisasi mau tidak mau pasti akan timbul pada waktu penentuan sasaran dan hasil patok, karena organisasi merupakan satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian dan sub-sub bagian yang mempunyai

spesialisasi tertentu tersebut tidak ditertibkan, maka mereka tidak akan mendukung tujuan organisasi secara utuh, karena mereka akan menuju sasarannya masing-masing.

Melalui struktur organisasi yang baik dapat menunjukkan suatu pembagian tugas yang jelas dan tepat dalam menempatkan pegawai untuk menghindari tidak tepatnya dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan pembagian tugas dalam suatu organisasi perlu diadakan dan dilaksanakan dalam upaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.



Sumber : website dinas komunikasi dan informatika

Gambar 2.1

Struktur Organisasi DISKOMINFO

2.3 Deskripsi Jabatan

a. Struktur Organisasi Jabatan Dinas Komunikasi Dan informatika Provinsi Jawa Barat

1. Kepala diskominfo Dr.H.Dudi sudrajatAbdurachim,MT
2. Sekretariat Drs. H. Asep Sukmana M.si membawahkan :
    a. Kasubag Bagian Perencanaan dan Program Tiomaida Seviana HH,SH,MH
    b. Kasubag bagian Keuangan Dra Iis Rostiasih,MSi
    c. Kasubag bagian Kepegawaian dan Umum Drs. Yaya Sudia
3. Bidang Pos Dan Telekomunikasi H. B. Subaedi,SH,M.Si membawahkan :
    a. Seksi Pos Dan Telekomunikasi Sri Wulan Nurnaningsih. SE.MM
    b. Seksi Monitoring dan Penetiban Spektrum Frekuensi Ir. Aksan Kholic
    c. Seksi Standarisasi Pos Dan Telekomunikasi Ir. S.Lesmonondjati,MM
4. Bidang sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi Drs. H. Karso S,MM membawahkan :
    a. Seksi Komunikasi Sosial Dra. Yeni Sri Mulyati
    b. Seksi Komunikasi Pemerintah Dan Pemerintah daerah Dra Lovita Adriana Rosa
    c. Seksi Penyiaran Dan Kemitraan Media Drs. Kusnadi

5. Bidang Telematika Ir. Hj lativah ,MT membawahkan
    a. Seksi Pengembangan Telematika Dadan Supyan,SE
    b. Seksi Penerapan telematika Asep saepullah.ST.MT
    c. Seksi Standarisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika Purnomo yustianto,ST.MT
6. Bidang Pengolahan Data Elektronik Drs Kiagus Denni Sofian,M,Si membawahkan:
    a. Seksi Kompilasi Data Rulianti,Se,Sos
    b. Seksi Integrasi Data Iwan Gunawan SE,Msi
    c. Seksi Penyajian Data dan Informasi Dian Istanti,. S.Sos,M.AP

b. Stuktur Organisasi Jabatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dinas Kominfo provinsi Jawa Barat

1. Kepala Balai LPSE Dra Ika Mardiah,m.Si Membawahi
    a. Kasubag Tata usaha Nurlela,ST,MM
    b. Kepala seksi layanan Tata Bina Udin,ST.M.SI
    c. Kepala Seksi Dukungan dan Pendayagunaan TIK Fera Tri Hartanti,ST,MT

2.4 Aspek kegiatan perusahaan

Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi, informatika dan hubungan masyarakat berdasarkan azas otonomi dan pembantuan.

Ada pun 4 macam aspek yang harus diperhatikan di Dinas Komunikasi Informatika yaitu :

a. Aspek kebijaksanaan
b. Aspek kelembagaan.
c. Aspek aplikasi.
d. Aspek perencanaan.